

ABSTRAK

An Nafin, 2024. Tinjauan Yuridis Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Pada Korban Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi. Program Studi Hukum, FH, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Sulistya Evingrum, S.H., M.H. (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

Pelecehan seksual berdampak fisik dan psikologis pada anak. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan tetapi masih banyak sekolah yang belum menerapkan suatu kebijakan untuk melindungi anak dari kasus pelecehan seksual. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor yang menjadi penyebab kasus pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah dan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dan interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian, yang *pertama*, tindakan pelecehan seksual terhadap anak masih sering terjadi di lingkungan pendidikan salah satunya sekolah. Terkait hal itu ada beberapa faktor yang menyebabkan tindakan pelecehan pada anak di lingkungan sekolah diantaranya: kurangnya pendidikan seksualitas; penyalahgunaan kekuasaan; faktor lingkungan sekolah; rendahnya etika dan moral; pendidikan agama; dan budaya. Hasil penelitian yang *kedua*, sekolah merupakan tempat pembelajaran bagi anak dalam menuntut ilmu namun kenyataannya seringkali dijadikan tempat kejahatan seksual, dalam hal ini seharusnya lembaga pendidikan memberikan kebijakan atas korban pelecehan seksual pada anak. Selain itu tindakan tegas perlu diambil ketika pelecehan seksual terjadi di sekolah. Sebagaimana diatur pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pelecehan seksual yang disebabkan oleh teman sebaya dengan perlakuan lebih dikenal ke perundungan dapat diajukan di pengadilan negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Pelecehan Seksual, Lingkungan Sekolah*

ABSTRACT

An Nafin, 2024. *Juridical Review of Legal Policies on Child Protection for Victims of Sexual Abuse in the School Environment Based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection*. Thesis. Law Study Program, FH, University of PGRI Madiun. Supervisor (I) Dr. Sulistya Evingrum, S.H., M.H. (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

Sexual abuse has a physical and psychological impact on children. The Indonesian government has stipulated Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, but there are still many schools that have not implemented a policy to protect children from sexual abuse cases. The purpose of this research is to find out the factors that cause cases of sexual abuse of children in the school environment and legal protection of children in cases of sexual abuse in the school environment. The method used in this study is normative juridical, the collection of legal materials through library research. The data analysis techniques used are the syllogism and interpretation methods. Based on the results of the research, first, acts of sexual abuse against children still often occur in the educational environment, one of which is schools. Related to this, there are several factors that cause acts of abuse in children in the school environment, including: lack of sexuality education; abuse of power; school environmental factors; low ethics and morals; religious education; and culture. The results of the second study, school is a place of learning for children in pursuing knowledge but in reality it is often used as a place for sexual crimes, in this case educational institutions should provide policies for victims of sexual abuse in children. In addition, strict action needs to be taken when sexual harassment occurs in schools. As stipulated in Article 81 and Article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Meanwhile, sexual harassment caused by peers with treatment better known as bullying can be filed in the district court in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: *Child Protection, Sexual Harassment, School Environment*